

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini bisnis pembangunan di Indonesia sedang berkembang, khususnya di perkotaan yang sangat besar seperti Yogyakarta, mengingat apa yang dicatat oleh organisasi penelitian dan konseling (BCI Asia, 2019), nilai pangsa pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia adalah mencapai Rp.453,3 miliar atau meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. sebelumnya. Sebanyak 65% bagian pangsa ini berasal dari konstruksi pekerjaan sipil dan sisanya merupakan pekerjaan pembangunan.

Sekarang ini pekerjaan konstruksi yang sangat rawan terhadap kecelakaan kerja, dipicu karena banyaknya risiko yang terlibat dalam suatu proyek. Selain itu, di Gedung bertingkat atau Gedung hotel dengan aktivitas kerja yang relative padat dengan tingkat risiko yang tinggi, sehingga semua perusahaan konstruksi harus memastikan keselamatan pekerja. Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang melibatkan perencanaan atau konsultan teknis, kontraktor sebagai pelaksana dan konsultan pengawas, semua orang yang terlibat dalam proyek, baik proyek perencana, kontraktor dan pengawas, masing-masing memberikan kontribusi sendiri untuk keselamatan konstruksi dan keselamatan kerja selama Tahun 1980-an. (Imammuddin,2020)

Di Indonesia, kasus kecelakaan kerja merupakan hal yang sangat serius, hal ini terbukti dari angka kecelakaan kerja yang masih tinggi. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) pada Tahun 2017 tercatat kecelakaan kerja terjadi sebanyak 123.041 kasus. Tahun 2018 terjadi peningkatan hingga mencapai 173.105 kasus. Kasus kecelakaan kerja dari tahun ke tahun meningkat mencapai 5%. Kasus kecelakaan kerja yang tingkat keparahan tinggi memperhatikan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 5% hingga 10% setiap tahunnya.

Kecelakaan kerja dalam usaha pembangunan bila diabaikan dapat berdampak, khususnya: 1. Dampak terhadap tenaga ahli, khususnya: rasa sakit, cacat dan kematian 2. Dampak yang terjadi pada proyek, yaitu: mengganggu

kelancaran kegiatan, keterlambatan hasil proyek, atau bahkan diberhentikan kegiatan, dan membengkaknya biaya proyek dan, 3. Dalam hal waktu, khususnya: biaya tambahan, dan penundaan dalam pelaksanaan proyek.

Kesehatan dan Keselamatan adalah sesuatu yang vital dan tidak dapat dipisahkan dalam proses produksi yang melibatkan buruh, mengingat iklim pembangunan. Kecelakaan kerja yang terjadi menyebabkan kerugian keuangan bagi perusahaan, namun juga dapat menyebabkan kematian pekerja, kerugian jangka panjang bagi perusahaan, karyawan dan keluarga karyawan. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di berbagai negara di dunia. (Maryani, dkk, 2015).

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mewujudkan K3 diperlukan Sistem Manajemen Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut SMK3. Sistem Manajemen K3 adalah dasar dari pedoman dan pengaturan K3 yang harus dilakukan dalam suatu instansi atau perusahaan, kerangkanya juga sangat solid berawal dari keterikatan manajemen yang terintegrasi dan menyeluruh Cakupannya meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan sehingga membentuk budaya K3 yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang efektif, aman, dan produktif.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sesuatu yang harus diklaim oleh semua perusahaan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem ketenagakerjaan dan SDM. K3 sangat penting untuk mengupayakan kualitas dan menjamin keamanan dan kesehatan pekerja. Demikian juga, K3 jelas mempengaruhi daya tahan kinerja dan produktivitas Jadi probematika K3 saat ini bukan hanya kewajiban buruh yang harus dipenuhi, tetapi juga harus dipenuhi oleh kerangka kerja. Dengan demikian, saat ini K3 bukan hanya sekedar komitmen namun telah menjadi kebutuhan vital bagi semua pekerja dan semua jenis pekerjaan.

Pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja juga mencakup tentang APD sebagai langkah penting dalam pengendalian risiko atau hierarki pengendalian bahaya. Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, kewajiban perusahaan terkait pencegahan kecelakaan, termasuk

penyediaan APD. Namun, tidak semua upaya ini berhasil tanpa tindakan atau kerja sama dari pihak perusahaan dan pekerjanya untuk mengurangi pelanggaran K3. (Setiaji,2020)

Oleh karena itu, untuk mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan gedung tinggi, maka program K3 diharapkan dapat dilaksanakan dan dilatih dengan baik dan sesuai dengan strategi pemerintah. Berdasarkan studi pembahasan dan pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Bertingkat Studi Kasus Pembangunan Gedung Hotel Novotel Temon, Kulon Progo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja pada pembangunan Gedung bertingkat?
2. Bagaimana analisis risiko kecelakaan kerja pada pembangunan Gedung bertingkat?
3. Bagaimana tingkat risiko kecelakaan pada pengerjaan pengecoran, pembesian, dan pembekistingan pada pembangunan Gedung Hotel Novotel Temon, Kulon Progo?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini meliputi:

1. Penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan Hotel Novotel Temon, Kulon Progo
2. Kegiatan proyek yang diteliti adalah mulai dari kegiatan pekerjaan pengecoran, pembesian, dan pemasangan *bekisting* pada plat lantai
3. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa kuesioner dan wawancara

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menila risiko kecelakaan kerja pada pembangunan Gedung Hotel Novotel Temon, Kulon Progo terutama pada pekerjaan pengecoran, pembesian, dan pembongkaran bekisting pada plat lantai, kolom dan balok.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

1. Bidang keilmuan, diharapkan untuk dijadikan sumber referensi bagi urgensi dalam mengatasi masalah serupa di kemudian hari.
2. Bidang Praktisi, diharapkan untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja dalam pembangunan Gedung bertingkat.